



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat Telp. 0823-9888-8900 website
<https://sulbar.bpk.go.id>, twitter: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

PENYERAHAN LHP ATAS LKPD TA 2022 PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Mamuju – Humas dan TU Perwakilan

Senin (22/05) – Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (LKPD TA) 2022 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Atas pemeriksaan tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI **Laode Nusriadi** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2022 yang berisi ringkasan atas 23 hasil pemeriksaan BPK yang meliputi 7 LHP LKPD, 6 LHP Kinerja, dan 10 LHP Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan enam Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat Kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, **Sitti Suraidah Suhardi** dan Pj. Gubernur Sulawesi Barat, **Zudan Arif Fakrulloh** pada Senin, 22 Mei 2023 di Mamuju.

Dalam sambutannya, Laode Nusriadi menyampaikan bahwa Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memperhatikan empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD TA 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, namun tetap perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, seperti:

1. penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari PT PPN TA 2022 kurang diperhitungkan senilai Rp4,99 Miliar;
2. Belanja Perjalanan Dinas pada 14 SKPD tidak sesuai ketentuan;



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Simboro, Mamuju,
Sulawesi Barat Telp. 0823-9888-8900 website
<https://sulbar.bpk.go.id>, twitter: @bpkrisulbar

SIARAN PERS

3. Kekurangan Volume atas empat paket pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan tujuh belas paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp493 juta;
4. Kesalahan penganggaran Belanja Modal pada tiga SKPD senilai Rp14,11 Miliar;
5. Pencatatan, penilaian, pengamanan, dan penatausahaan Aset Tetap belum tertib;
6. Penerimaan bantuan sekolah dari Kementarian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum dilaporkan dan disajikan Senilai Rp6,44 Miliar; dan
7. Pengelolaan jaminan Izin Usaha Pertambangan belum dilaksanakan dengan tertib.

Lebih lanjut, Laode Nusriadi mengharapkan DPRD dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, serta mengingatkan Gubernur Sulawesi Barat beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. “Kami juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menindaklanjuti Rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima” jelasnya. Selain itu, menyampaikan kepada Gubernur dan DPRD untuk mendorong peningkatan persentase Penyelsaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK agar dapat mencapai standar minimum nasional yaitu sebesar 75%. Dimana, sampai dengan Semester II Tahun 2022 persentase tingkat Penyelsaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 70,39%

Di akhir sambutannya, Laode Nusriadi mengucapkan selamat dan teriman kasih kepada Gubernur Sulawesi Barat beserta jajarannya dan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat atas pencapaian opini WTP untuk kesembilan kalinya yang turut mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dan mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang telah menjalankan mandat pemeriksaan dengan baik. Semoga upaya tersebut turut mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat yang semakin maju, makmur, dan sejahtera.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**